

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk menetapkan Penolakan Inggris Terhadap Traktat Lisbon Dan Perjanjian Fiskal Uni Eropa Tahun 2007-2012, menjadi judul skripsi. Alasan pertama adalah Inggris merupakan Negara yang unik, dimana sistem politik dasar pemerintahannya adalah monarki konstitusional dan sistem parlementer. Dalam sistem ini, Inggris tidak memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1707. Berdasarkan Undang-Undang Kesatuan tahun 1707 Inggris dan Skotlandia bergabung menjadi satu Kerajaan Britania Raya.¹

Alasan yang kedua, banyak hal yang terjadi di Eropa. Khususnya mengenai Regionalisme Eropa melalui Organisasi Internasional Uni Eropa yang merupakan fenomena yang mampu menarik perhatian dunia dan fenomena itu tidak jarang menjadi kontroversi maupun polemik di kalangan masyarakat Internasional, khususnya masyarakat Inggris secara luas.

Ketiga, Inggris mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap Uni Eropa dan sangat bertolak belakang sekali dengan pandangan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Beberapa kali Inggris menolak kesepakatan bersama yang telah dikeluarkan oleh Uni Eropa. Inggris tidak mau mengadopsi mata uang tunggal Euro, tidak mau meratifikasi Konstitusi Uni Eropa (UE), dan tidak mau meratifikasi Perjanjian Fiskal Uni Eropa. Sikap Kontroversial Inggris menjadi pertanyaan besar untuk di kaji lebih mendalam.

¹ Wikipedia <http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris> diakses tanggal 25 November 2012

Dengan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“Penolakan Inggris Terhadap Traktat Lisbon dan Perjanjian Fiskal Uni Eropa Tahun 2007-2012”**

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi sikap Inggris terhadap Uni Eropa tahun 2007-2012. Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai aplikasi dari penerapan teori-teori maupun konsep yang pernah penulis peroleh di bangku perkuliahan. Tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penelitian ini akan dijadikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Pada awal-awal tahun berdirinya, kerjasama diantara negara-negara Uni Eropa hanya berkisar pada bidang perdagangan dan ekonomi saja, tetapi sekarang kerjasama tingkat Uni Eropa sudah mencakup bidang-bidang yang lebih luas yang berhubungan langsung dengan hajat hidup manusia. Misalnya tentang hak-hak warga negara, jaminan kepastian dalam kebebasan, keamanan, dan keadilan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, serta pembangunan regional. Uni Eropa telah memberi kontribusi setengah abad lebih pada stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan. Selain itu Uni Eropa juga telah membantu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, membentuk

pasar tunggal Eropa, menyatukan mata uang Eropa (Euro), dan memberi kemudahan layanan administrasi lintas batas negara.

Proses perluasan keanggotaan Uni Eropa telah dilakukan sejak masih bernama Komunitas Eropa (*European Community*). Pada awal mulanya anggota Komunitas Eropa hanyalah 6 negara yaitu Perancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda dan Luxembourg. Namun jumlah anggota EC sendiri terus bertambah menjadi 9 di 1970-an. 12 di era 80-an dan 15 di era 90-an. Runtuhnya rezim Komunis di Eropa Timur dan Tengah membuat integrasi antara negara-negara di Eropa menyentuh negara-negara yang di era perang dingin sulit ditembus.

Di era 90-an sendiri Uni Eropa sudah berkembang menjadi 15 negara dimana penambahan tersebut terdiri dari Inggris, Denmark dan Irlandia (Era 70-an), Yunani, Spanyol dan Portugal (1980-an) serta Austria, Finlandia dan Swedia (1990-an). Babak pertama dari perluasan tersebut disebut “perluasan utara”.

Inggris menyatakan bergabung dengan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1961. Alasan politik dan ekonomi melatarbelakangi Inggris untuk bergabung dengan organisasi tersebut.² Secara politik, Inggris tidak lagi mendominasi sebagai kekuatan super power di dunia. Posisinya di waktu itu telah digantikan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hubungan Inggris dengan negara-negara persemakmurannya juga mengalami kemunduran. Dimana negara persemakmuran mulai mandiri secara seutuhnya tanpa bergantung kepada Inggris, jika Inggris tidak bergabung dengan EEC

² Neill Nugent, *The Government and Politics of The European Union* (London, 1999), hal. 27-28

(*European Economic Community*)³, maka Inggris kehilangan kekuatan dan *bargaining position* di dalam kancah percaturan politik dunia.

Secara ekonomi, Inggris melihat bahwa ekonomi negara-negara anggota EEC berkembang sangat pesat apabila dibandingkan dengan ekonomi negaranya. Inggris melihat bahwa pada saat itu integrasi Eropa mampu memperkuat posisi Eropa dalam pasar dunia. Oleh sebab itu, Inggris yakin dan bergabung dengan EEC dengan tujuan untuk dapat mempermudah dan memperluas perdagangannya.

Keputusan pemerintah Inggris ini disetujui dan mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Sebab pejabat EEC berjanji bahwa EEC tidak akan lebih dari sekedar perjanjian perdagangan (*trade agreement*) biasa. Akan tetapi perkembangan selanjutnya EEC menjelma dan bertransformasi menjadi sebuah institusi yang semakin kuat dan terintegrasi. Tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, akan tetapi telah meluas ke dalam bidang politik.

Mata uang tunggal Euro dan Konstitusi Uni Eropa adalah langkah integrasi UE (Uni Eropa) dalam bidang ekonomi dan politik. Euro yang diperkenalkan pada tahun 1999 menjanjikan berbagai macam kemudahan dan keuntungan bagi negara anggota yang meratifikasinya. Harmonisasi pajak, subsidi silang, dan pemberian jaminan sosial pada negara yang membutuhkan adalah konsekuensi yang menguntungkan bagi negara yang telah meratifikasinya. Pembentukan mata uang tunggal Euro sebagai tahap akhir penyatuan ekonomi dan moneter merupakan salah satu fenomena terakhir dalam proses integrasi kawasan di Uni Eropa. Namun terdapat beberapa

³ Pada tahun 1957, keenam anggota ECSC menggagas kerjasama yang cukup ambisius, yaitu dengan menciptakan *common market*. Oleh sebab itu, pada tahun 1957 ECSC resmi berubah nama menjadi *European Economic Community* (EEC)

hambatan diantara negara anggota Uni Eropa untuk memberikan komitmen yang kuat ke arah integrasi secara menyeluruh. Hal ini tampak saat Inggris, Swedia, dan Denmark memutuskan untuk menunda bergabung dalam euro. Mengingat keberadaan Inggris sebagai salah satu negara besar di Eropa, maka setiap tindakannya akan memberikan dampak pada langkah-langkah integrasi Eropa selanjutnya.

Bergabung dengan mata uang tunggal Euro memiliki konsekuensi hilangnya Poundsterling dan otoritas kebijakan moneter nasional Inggris sendiri. Kelompok yang bersifat skeptis, memiliki kekhawatiran euro akan menjadi titik awal pelucutan kebijaksanaan nasional hingga merongrong kedaulatan nasional.

Inggris secara kelembagaan telah menjadi anggota Uni Eropa, namun kehidupan bernegara masyarakat Inggris belum terintegrasi sepenuhnya di dalam komunitas Uni Eropa. Inggris tidak percaya dengan penyeragaman atau harmonisasi tingkat suku bunga (*interest rate*) bagi pembangunan perekonomian domestiknya. Inggris tidak mempercayai adanya konsep *one size fits all* ini. Hal ini dipicu oleh pengalaman pahit Inggris sendiri yang pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1992 setelah bergabung dengan ERM (*Exchange Rate Mechanism*). Dimana konsep ERM adalah menstabilkan nilai tukar mata uang dengan jalan pengaturan tingkat suku bunga. Pada saat itu suku bunga yang telah di tetapkan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kebutuhan perekonomian dalam negeri Inggris. Perekonomian yang sempat jatuh, menjadikan Inggris lebih mempercayai Poundsterling daripada Euro. Berbagai macam pertimbangan politik dan ekonomi mengenai berbagai

dampak yang timbul sebagai konsekuensi keanggotaan dalam mata uang tunggal Eropa menjadi dasar keputusan Inggris untuk menunda keikutsertaannya menggunakan mata uang euro sebagai mata uang negaranya.

Seiring dengan perjalanan waktu dan penambahan jumlah anggota Uni Eropa maka pada tahun 2000 diputuskanlah suatu ide gagasan untuk memperbaharui aturan-aturan dan kerangka kerja UE. Maka dimunculkanlah suatu gagasan mengenai Konstitusi, Konstitusi inilah yang merupakan pedoman dasar bagi organisasi Uni Eropa untuk lebih memperjelas arah, fungsi dan tujuan UE.

Konstitusi UE lebih mempertegas posisi dan kewenangan antara pemerintah nasional dengan kewenangan UE. Secara tidak langsung Konstitusi UE yang baru ini lebih memiliki kewenangan layaknya sebuah negara pada umumnya. Konstitusi UE memberikan UE *exclusive legal power* untuk menentukan setiap keputusan kebijakan. Diantaranya kewenangan di dalam menentukan kebijakan moneter, quota perdagangan, tarif, aturan berkompetisi dan perjanjian perdagangan dengan negara lain.

Secara keseluruhan, Konstitusi UE yang dihasilkan pada tahun 2004 menandakan bahwa UE memiliki kewenangan layaknya sebuah negara. Konstitusi ini memberikan penekanan didalam membuat kerangka kerjasama pertahanan bersama (*Common Defense*). Yang berarti mengizinkan setiap negara anggota yang menjadi korban dari suatu agresi, dapat meminta bantuan militer pada negara anggota UE lainnya. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang dimotori oleh Amerika Serikat. Pembentukan "*European Defence Union*" mendapat

dukungan dari Belgium, Perancis, Jerman dan Luxemburg. Sementara Inggris dan Netherland berpendapat lain dan tidak membutuhkan suatu bentuk pertahanan semacam ini. Bagi mereka, jaminan pertahanan sudah cukup melalui NATO. Pembentukan pertahanan diluar kerangka NATO justru memakan banyak biaya dan secara politis dapat memecah belah antar negara anggota UE maupun antara UE dengan AS.

Pada tahun 2007 di dalam UE muncul kembali fenomena yang hampir sama dengan fenomena pada tahun 2000. Traktat Lisbon yang ditandatangani pada 13 Desember 2007 hanya memiliki tujuh buah artikel, namun isi dari artikel-artikel tersebut cukup banyak menuai pro-kontra di kalangan negara-anggota. Beberapa analis menilai bahwa substansi Traktat Lisbon memiliki prosentase 90% kemiripan dengan Traktat Konstitusional yang gagal disetujui.⁴ Beberapa lainnya berpendapat bahwa Traktat Lisbon ini ialah jalan tengah, antara mereka (negara-anggota) yang dulu telah meratifikasi atau dengan kata lain setuju dengan Traktat Konstitusional dengan mereka yang menolak traktat tersebut karena menganggap Traktat Konstitusional terlalu ambisius (dalam konteks pengintegrasian Uni Eropa).⁵

Traktat Lisbon akan mengatur secara mendalam hukum bersama mengenai hak asasi manusia, migrasi atau perpindahan penduduk, kejahatan internasional, dan sebagainya. Dengan kata lain, traktat ini akan lebih menyentuh kebijakan-kebijakan level *grassroot*, meskipun bukan berarti konsentrasi mereka terhadap kebijakan level *non-grassroot* berkurang.

Terlepas daripada itu secara garis besar substansi Traktat Lisbon memiliki

⁴ CRS Report for Congress, *The European Union's Reform Process: The Lisbon Treaty*, hal. 3.

⁵ G. Maganza, 'The Lisbon Treaty: a Brief Outline', *Fordham International Law Journal*, Vol.31, Issue 6, 2007, hal. 8.

tiga inti utama, yakni berusaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demokrasi, membuat proses pengambilan keputusan yang semakin efisien, dan terutama sekali berusaha merealisasikan ‘satu suara’ Uni Eropa.⁶

Dalam traktat ini, upaya Uni Eropa untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi terlihat dari diberikannya *power* yang lebih besar terhadap Parlemen Eropa, legislatif nasional negara anggota dan rakyat negara anggota Uni Eropa. Parlemen Eropa memiliki salah satu fungsi utama sebagai ‘*co-decision*’ bersama dengan Dewan Menteri, yang artinya suatu peraturan baru dapat menjadi hukum apabila telah disetujui oleh Parlemen Eropa dan Dewan Menteri. Melalui traktat ini, fungsi ‘*co-decision*’ dari Parlemen Eropa diperluas. Institusi tersebut akan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan di beberapa area baru seperti agrikultur, perdagangan dan bahkan isu domestik negara-anggota. Sementara itu dalam konteks legislasi nasional tiap negara anggota, Uni Eropa akan memberikan mereka otoritas yang lebih besar dalam hal pembuatan kebijakan dan draft legislasi di Uni Eropa. Secara khusus, Parlemen Nasional akan diberikan hak untuk melakukan tes subsidiaritas terhadap Rancangan Undang-Undang dan mereka dapat menolak RUU tersebut apabila sangat bertentangan dengan keinginan mereka. Terakhir, Uni Eropa ingin semakin melibatkan rakyat dari negara-negara anggota mereka

⁶ AGE, ‘Introduction to the European Institutions and the European Union Policy-Making Processes of Relevance to Older People’, Edisi ketiga, Maret 2010, <<http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/senior/introduction-institutions-europeennes-personnes-agees/introduction-institutions-europeennes-personnes-agees-en.pdf>>, hal 2-3.

melalui konsep Inisiatif Rakyat. Ide dari konsep ini ialah bahwa rakyat-rakyat tersebut dapat memberikan petisi ke Komisi Eropa.

Sementara itu inti dari poin ketiga ialah bahwa traktat ini ingin membuat Uni Eropa semakin terintegrasi, terutama sekali ketika mereka berada dalam panggung internasional sebagai aktor global. Salah satu wujud dari realisasi penyatuan suara Uni Eropa tersebut ialah dengan membentuk beberapa posisi baru, yakni jabatan Presiden Dewan Eropa dan jabatan Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa. Melalui traktat ini, Dewan Eropa dirubah sifatnya menjadi sebuah institusi. Presiden Dewan Eropa pertama ialah Herman Van Rompuy, yang merupakan mantan Perdana Menteri Belgia. Jabatan presiden ini memiliki periode masa tugas selama 2,5 tahun, di mana pemilihan jabatan presiden tidak memerlukan persetujuan dari Parlemen Eropa (dilakukan oleh Dewan Eropa dengan konsep QMV). Selain untuk menjalankan fungsinya sebagai penyelaras kerja *European Council* dan menyelenggarakan pertemuan, Presiden adalah simbol kepemimpinan. Ekspektasi masyarakat internasional akan Presiden Dewan Eropa, ialah bahwa mereka nanti akan menjadi pengarah dan ujung tombak dari pengambilan kebijakan Uni Eropa serta aktor krusial yang mewakili Uni Eropa di dunia internasional. Adanya fungsi presiden ini semakin menambah faktor kemiripan antara Uni Eropa dengan sebuah negara.

Melalui Traktat Lisbon ini, selain Presiden Dewan Eropa juga akan ada satu posisi baru di dalam Uni Eropa. Jabatan tersebut ialah Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa atau *High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy*. Jabatan

ini sendiri, sebenarnya ialah merger atau penyatuan dari jabatan yang sudah ada sebelumnya, yakni Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum serta Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa. Semula di Traktat Konstitusional, jabatan ini telah ada namun dengan nama '*Union Minister of Foreign Affairs*'. Penggunaan nama tersebut tentu menimbulkan perdebatan, dan akhirnya batal digunakan karena penolakan keras dari Inggris. Adanya jabatan ini (terlebih jabatan ini akan mendapatkan korps diplomatik mereka sendiri) tentu akan berimplikasi pada semakin terintegrasinya Uni Eropa dalam diplomasi politik internasional. Hubungan luar negeri antar tiap negara anggota akan semakin selaras, dan hal tersebut jelas menunjukkan integrasi politik yang luar biasa. Ini dikarenakan dengan beragam perbedaan kepentingan luar negeri setiap negara-anggota, dipersatukan dan dibentuk satu kebijakan luar negeri ke luar Uni Eropa yang mewakili seluruh kepentingan negaranya. Artinya, untuk mencapai kebulatan kebijakan yang akan diambil, harus ada kepentingan luar negeri negara anggota yang harus dikompromikan.

Perkembangan yang terjadi di UE yang terakhir, pada tahun 2008 Yunani sebagai salah satu Negara anggota Uni Eropa mengalami krisis moneter. Kemudian krisis ini meluas dan menyebar di negara Uni Eropa lainnya seperti Irlandia, Spanyol, Italia, Siprus, Perancis dan Portugal. Langkah-langkah dan upaya Uni Eropa untuk mengatasi krisis moneter tersebut dengan cara membuat Perjanjian Fiskal Uni Eropa. Perjanjian ini mempunyai tujuan agar ada koordinasi kebijakan anggaran pada semua negara anggota untuk mencegah akumulasi jumlah hutang yang berlebih.

Namun Inggris melakukan penolakan rencana perjanjian baru yang akan digulirkan Uni Eropa, khususnya dalam melakukan kebijakan dibidang fiskal dan anggaran. Penolakan Inggris itu, membuat masa depan euro dan zona euro menjadi suram. Kelangsungan hidup euro menjadi terancam. Nampaknya, sejumlah negara Eropa sudah ancap-ancang untuk kembali menggunakan mata uang mereka masing-masing. Ini akan lebih mengancam bukan hanya mata uang euro, tetapi keberadaan organisasi Uni Eropa, yang beranggotakan 27 negara.

Kekacauan moneter dan krisis utang Eropa masih sangat besar dan melahirkan sejumlah pertanyaan meresahkan. Krisis hutang ini, tidak hanya mengancam mata uang euro, akan tetapi dapat menghantam kesatuan negara-negara Uni Eropa, yang sudah mereka bangun dengan susah payah. Jika krisis ini terus memuncak, dan salah satu negara anggota Uni Eropa keluar dari keanggotaan dan meninggalkan mata uang euro, maka Uni Eropa disinyalir dapat runtuh. Inilah ancaman terbesar di tengah krisis yang mendera Uni Eropa dan mata uang euro saat ini. Sejak Yunani mengalami default (bangkrut), yang kemudian disusul Itali, pandangan buram dan penuh skeptisme terus membayangi daratan Eropa. Akhirnya, mereka para pemimpin Uni Eropa lebih memilih mempertahankan kepentingan nasionalnya masing-masing.

Jerman yang menjadi penyangga ekonomi Uni Eropa, sudah tidak sanggup lagi, dan menyatakan angkat tangan (*hand of*), jika harus terus-menerus menggelontorkan *bailout* kepada negara-negara yang terkena krisis keuangan saat ini. Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan, "Kami tidak mungkin

terus mengeluarkan dana talangan kepada negara-negara yang sekarang tertimpa krisis", ujarnya.

New York Times membuat liputan tentang krisis ekonomi dan hutang yang menggerogoti mata uang euro dan sekarang mencapai puncaknya dimana mata uang euro jatuh pada posisi terendah terhadap nilai Dollar Amerika selama tiga pekan di akhir Tahun 2012. Krisis hutang yang sudah ditimbun oleh negara-negara Uni Eropa dalam jangka waktu puluhan tahun itu sekarang dampaknya seperti benang kusut, yang tidak dapat dipecahkan sampai saat ini.

Krisis hutang Eropa yang bermula dari Yunani kemudian merembet ke seluruh benua Eropa mempunyai efek berantai yang dampaknya sangat luas. Seluruh daratan benua Eropa sekarang ini sangat rentan dan dalam ancaman bahaya krisis hutang yang akan mengubah seluruh tatanan politik dan ekonomi.

Sejumlah ekonom sudah mulai memikirkan kemungkinan mata uang lainnya dan melirik kepada dirham yang dinilai cukup stabil. Krisis hutang ini ikut menghancurkan bank-bank besar di Eropa, berhentinya modal dari luar negeri, pengangguran yang terus melonjak, dan bahkan salah satu negara anggota Uni Eropa yaitu Spanyol tingkat penganggurannya telah mencapai 40 persen. Mata uang euro jatuh, pasar modal rontok, menjauhnya kreditor asing, dan menimbulkan trauma masyarakat yang telah banyak kehilangan uang mereka. Kemungkinan kondisi ini akan menimbulkan depresi besar yang akan melanda Uni Eropa. Karena nampaknya sangat sulit negara-negara anggota Uni Eropa bisa melepaskan kepentingan nasional mereka. Mereka akan menghadapi rakyat yang marah. Ini sebuah kondisi yang akan dihadapi dan memaksa para

pemimpin Uni Eropa harus memilih antara tetap bertahan dalam Uni Eropa atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu :
”Mengapa Inggris Menolak Traktat Lisbon dan Perjanjian Fiskal Uni Eropa Tahun 2007-2012 ?“.

E. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu, sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.⁷

Teori sebagai perangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan data dasar sehingga dapat diamati, dan dapat berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena yang diamati.⁸

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, penulis akan menguraikan beberapa teori yang melatar belakangi sikap Inggris di dalam melihat Uni Eropa.

⁷ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990,hal 186.

⁸ Glean E, Snellbecker,dalam : Lexy j.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991) hal 61.

1. Teori Politik Luar Negeri (Teori Internal – Eksternal Setting Dari Snyder, Bruck Dan Sapin).

Richard Snyder, H.W. Bruck, dan Burton Sapin adalah tokoh awal yang mengkaji teori - teori politik luar negeri. Mereka mencoba mengkaji lebih dalam “ *state* “ yang di dalam perspektif realisme hanya dijelaskan sebagai aktor utama yang memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara yang tidak diuraikan secara lebih lanjut. Mereka mengatakan :⁹

Karenanya, adalah penting untuk menganalisis aktor-aktor (para pembuat keputusan resmi) dalam hal-hal berikut : (a) pemilahan dan penghubungan obyek-obyek, kondisi-kondisi dan aktor-aktor lain-berbagai hal dipersepsikan atau diharapkan dalam suatu konteks relational ; (b) keberadaan, pembuatan atau definisi dari tujuan-yang diinginkan dari situasi; (c) pengaitan signifikansinya terhadap berbagai tindakan yang dihubungkan dengan situasi mengikuti beberapa kriteria pengiraan; dan (d) penerapan standards of acceptability yang (1) mempersempit pilihan persepsi, (2) mempersempit pilihan obyek-obyek yang diinginkan, dan (3) mempersempit jumlah alternative (Snyder, et al., 1962 : 59).

Dengan demikian Snyder mengakui bahwa keputusan yang di buat oleh para pembuat keputusan negara dan keputusan politik luar negeri dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar unit keputusan (*faktor internal* dari *seting-seting eksternal*). *Seting* adalah seperangkat pengelompokan faktor-faktor yang secara potensial relevan dan kondisi-kondisi yang mungkin mempengaruhi tindakan negara (Snyder, et al., 1962: 60).¹⁰

Seting yang mempengaruhi pembuatan keputusan negara tersebut terdiri dari dua hal : *internal dan eksternal*. *Seting internal* memberi arah pedoman kepada cara-cara masyarakat suatu negara diorganisasikan dan berfungsi.

⁹ Abu Bakar Eby Hara, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri , Dari Realisme sampai Konstruktivisme, Nuansa* , Bandung 2011, hal 85-86.

¹⁰ *Ibid*, hal.88

Di dalam ciri-ciri dan perilaku orang dan habitat fisik seperti politik domestik dan politik kepartaian, opini dan sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional (kepentingan nasional). Seting eksternal menunjukkan pada faktor-faktor dan kondisi yang ada di luar wilayah teritori negara.

Dengan demikian pendekatan pembuatan keputusan politik luar negeri sangatlah kompleks, akan tetapi dapat di tarik dan diwakili dengan dua interval yang berpengaruh sangat kuat sekali di dalam metode pembuatan keputusan politik luar negeri. Faktor eksternal yang berada di luar teritori wilayah negara dan faktor internal yang terjadi di dalam negeri suatu negara adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan.

Inggris mempunyai pandangan yang berbeda di dalam melihat Uni Eropa. Hal ini di pengaruhi oleh cara pandang pembuat keputusan di Inggris yang mampu melihat kondisi yang sebenarnya di Uni Eropa dan kondisi di dalam negrinya sendiri. Pendekatan melalui pola-pola Snyder mampu menarik sebuah kesimpulan berbeda negara Inggris dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.

Seting internal Inggris di wakili oleh pola-pola pendekatan yang dapat diamati secara langsung pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Hal ini dapat diwakili oleh kondisi politik dan ekonomi yang terjadi di Inggris tahun 2007-2012. Kondisi ekonomi Inggris berdasarkan data Principal European Economic Indicator (PEEIs) mengalami keadaan yang tidak menggembirakan. Per Juli 2011 angka pengangguran mencapai 8,1%. Sedangkan Economic Outlook OECD

November 2011 lalu merilis bahwa real Gross Domestic Product Inggris menunjukkan tahun 2010 sebesar 1,8%, tahun 2011 sebesar 0,9%. Sedangkan untuk kawasan Eropa, real GDP tahun 2011 adalah sebesar 1,6% dan pada tahun 2010 pada angka 0,2%.¹¹

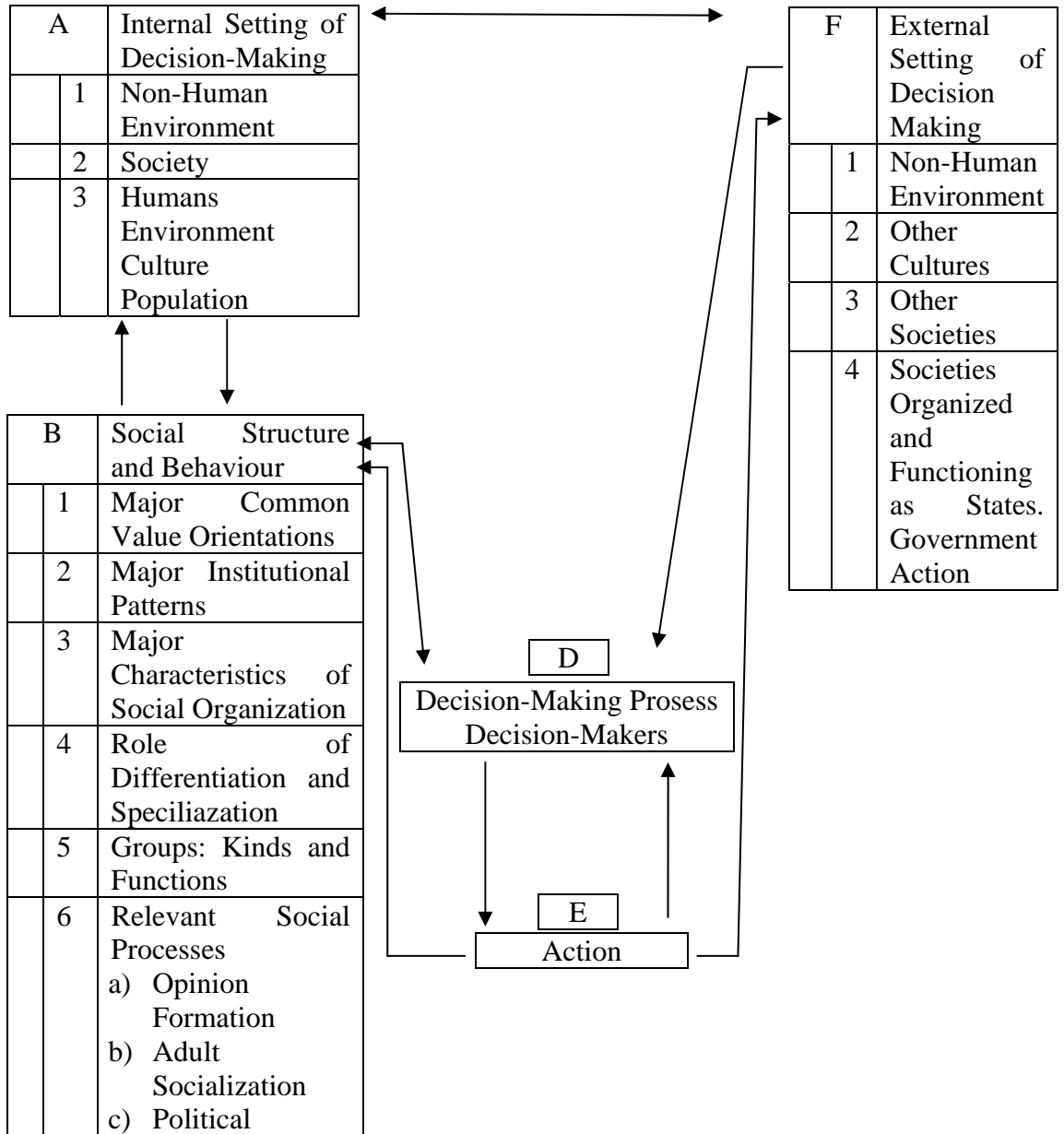
Fakta ini menunjukkan bahwa Inggris pun ikut terseret dalam pusaran krisis Eropa. Penurunan real GDP hampir separuhnya yang terjadi pada tahun 2012 sebenarnya juga ikut mempengaruhi banyak industri yang ada di Inggris. Hal ini menjadi salah satu faktor internal yang menjadi pertimbangan bagi Perdana Menteri David Cameron terhadap Uni Eropa.

Faktor eksternal yang menjadi sorotan utama bagi Inggris adalah kondisi yang terjadi di Uni Eropa. Krisis ekonomi yang melanda Uni Eropa yang dimulai pada tahun 2008 belum bisa di hentikan sampai saat ini, bahkan meluas dari Yunani berdampak ke Italia, Siprus, Perancis dan Portugal. Langkah-langkah dan upaya Uni Eropa untuk mengatasi krisis moneter tersebut dengan cara Perjanjian Fiskal Uni Eropa. Perjanjian ini mempunyai tujuan agar ada koordinasi kebijakan anggaran pada semua negara anggota untuk mencegah akumulasi jumlah hutang yang berlebih. Faktor-faktor inilah yang menjadi pertimbangan sikap Inggris dan pengambilan keputusan politiknya terhadap Uni Eropa. Hal ini lebih dapat di jelaskan melalui Table Snyder Setting di bawah ini.

¹¹ <http://petapolitik.com/news/mayoritas-rakyat-inggris-ingin-keluar-dari-uni-eropa/> Diakses pada tanggal 17 Desember 2012

TABEL 1

Snyder Setting



Dari table diatas Snyder ingin menjelaskan bahwa dalam suatu proses pembuatan kebijakan politik luar negri, pemerintah di pengaruhi oleh dua faktor. Yaitu perilaku negara (faktor internal), dalam hal ini persoalan internal yang terjadi di dalam suatu negara atau keadaan domestiknya dan faktor eksternal yang berada di luar negara, yaitu menyangkut lingkungan internasional.

Snyder, Bruck dan Sapin mencoba memberikan penjabaran yang luas mengenai pentingnya persepsi tentang situasi. Persepsi inilah yang kemudian dapat memproses informasi, baik dilakukan secara individu maupun organisasi.

Di dalam proses pembuatan keputusan, banyak alternatif yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu kebijakan politik luar negri, termasuk di dalamnya adalah riset sosial yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan keputusan politik luar negri cocok dengan analisis lingkungan organisasional. Institusi atau organisasi dalam sebuah keputusan adalah hal terpenting di dalam pembuatan keputusan. Mereka mempercayakan organisasi atau institusi untuk merumuskan pemilihan dan penerapan suatu kebijakan.

Snyder berupaya untuk mengandalkan berbagai informasi dari berbagai macam ilmu yang berbeda untuk mencapai suatu hasil akhir kebijakan politik luar negri. Elit ditempatkan sebagai aktor penting dalam pembuatan kebijakan luar negri dengan memperhatikan aspek individu aktor tersebut, misalnya kecerdasan, pengalaman, psikologi serta birokrasi dimana aktor tersebut berada. Faktor eksternal (lingkungan internasional) dan faktor

internal (individu) mempengaruhi pembuatan keputusan dalam menganalisis sebuah situasi, jadi bukan power yang di gunakan sebagai bagian penting di dalam memutuskan suatu kebijakan luar negri tetapi informasi adalah hal yang terpenting. Secara lebih mendalam Snyder menjelaskan produk politik berupa perilaku atau kebijakan negara dengan jalan mengamati unit-unit atau bagian yang membentuk sistem sebagai unit analisisnya.

2. National Interest.

Menurut Morgenthau :¹²

”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.

Kepentingan Nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara berdasarkan kebutuhan dalam suatu negara. Dalam hal kepentingan nasional, setiap negara hampir mempunyai persamaan. Kemanaan dan kesejahteraan adalah bisa diidentikkan sebagai kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat juga di definisikan sebagai tujuan nasional.

Tujuan nasional Inggris mulai bergabung dengan Uni Eropa adalah mengikuti pasar bebas dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang dijanjikan di dalam satu wadah kerangka kerja sama Uni Eropa.

¹² <http://iwansmile.wordpress.com/konsep-kepentingan-nasional-national-interest/> Diakes pada tanggal 17 Desember 2012

Akan tetapi Uni Eropa telah mengintegrasikan jauh ke dalam, lebih dari sekedar perjanjian perdagangan perekonomian biasa. Penyatuan mata uang tunggal Euro, membentuk identitas bersama melalui Konstitusi UE dan perjanjian fiskal adalah wujud dari proses integrasi ekonomi dan politik.

Dengan adanya national interest yang berbeda dengan Uni Eropa, maka Inggris beberapa kali menolak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Uni Eropa. Mulai dari penolakan penyatuan mata uang tunggal Euro, tidak meratifikasi Konstitusi Uni Eropa, dan tidak mau menandatangani perjanjian Fiskal Uni Eropa untuk mengatasi masalah krisis yang sedang melanda negara-negara anggota Uni Eropa beberapa tahun terakhir ini.

Pengambilan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang telah dilakukan Inggris terhadap Uni Eropa mendapat respon positif dari masyarakat Inggris. Dalam polling jajak pendapat yang digelar bersamaan dengan pelaksanaan KTT Uni Eropa pada 9-10 Desember 2012 dilakukan oleh ComRes memperlihatkan bahwa 52% rakyat Inggris berpendapat bahwa krisis euro merupakan kesempatan yang ideal bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa.¹³

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori di atas, hipotesa yang dapat ditarik dari rumusan masalah : “Inggris menolak Traktat Lisbon dan Perjanjian Fiskal di dalam dinamika politik dan ekonomi yang sedang terjadi di dalam Uni Eropa untuk menjaga dan menyelamatkan kepentingan nasionalnya”.

¹³ <http://petapolitik.com/news/mayoritas-rakyat-inggris-ingin-keluar-dari-uni-eropa/> Diakses pada tanggal 17 Desember 2012

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data berupa studi pustaka (dokumen) yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder. Dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan :

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literatur yang relevan, buku, jurnal cetak maupun elektronik, working paper, surat kabar-surat kabar, dan internet.
2. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatif (menjelaskan) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan dan bagaimana di dalam menganalisa fakta-fakta yang terkumpul, yang didapat melalui data kualitatif.

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari 5 Bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan secara lebih rinci kedalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan yang lainnya sangat berhubungan, sehingga pada akhirnya nanti akan membentuk sebuah karya tulis yang runut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan konseptualisasi dan rencana penelitian yang akan dilakukan penulis guna menemukan jawaban atas fenomena yang hendak penulis analisis. Dalam bab I ini berisi pendahuluan, diantaranya

berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Dinamika Politik dan Ekonomi Uni Eropa Tahun 2007-2012, dalam bab ini memuat tentang fenomena-fenomena politik dan ekonomi yang terjadi di Uni Eropa dengan membatasi waktu pada Tahun 2007-2012.

Bab III Sikap-Sikap Inggris Terhadap Uni Eropa, dalam bab ini akan menguraikan tentang pembuktian sikap-sikap Inggris terhadap Uni Eropa yaitu sikap skeptisme rakyat Inggris, hasil polling dan sikap Perdana Menteri David Cameron.

Bab IV, Politik Luar Negeri Inggris Terhadap Uni Eropa bab ini akan menguraikan tentang Politik Luar Negeri Inggris khususnya terhadap Uni Eropa.

Bab V Kesimpulan, merupakan “hasil akhir” dari penulisan skripsi ini.